

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN JASA PEMANDUAN
DAN PENUNDAAN KAPAL DI PERAIRAN
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti

2340058040



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

**ANALISIS PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN HUKUM
DALAM PENYELENGGARAAN JASA PEMANDUAN
DAN PENUNDAAN KAPAL DI PERAIRAN
INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan akademik guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.) Pada Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Oleh

Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti

2340058040



**PROGRAM STUDI HUKUM
PROGRAM SARJANA HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2026**

VISI DAN MISI
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

VISI

"Menjadi Fakultas Hukum yang bermutu, mandiri dan inovatif di kawasan Asia pada tahun 2030 dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang hukum yang antisipatif terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi yang sesuai dengan nilai-nilai Kristiani dan Pancasila."

MISI

1. Mempersiapkan sarjana hukum yang mampu menggunakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi dibidang perkembangan ilmu hukum melalui pendekatan ilmiah, interdisipliner, dan transnasional sesuai dengan aturan perkembangan zaman agar mampu bersaing di era global.
2. Mempersiapkan sarjana hukum yang menguasai ilmu dan senantiasa menegakkan nilai moral, etika serta rasa cinta kepada Negara, berperilaku yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.
3. Mengembangkan pengetahuan umum, yang berwawasan nasional dan internasional.
4. Mengembangkan dan meningkatkan penelitian serta profesionalisme dalam ilmu pengetahuan hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.
5. Menyelenggarakan jenjang pendidikan akademik berkelanjutan dan profesi dalam bidang hukum.
6. Mendorong penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat meningkatkan kesadaran hak dan kesadaran hukum serta kesejahteraan rakyat Indonesia.
7. Membina hubungan kerjasama dengan praktisi hukum dan instansi penegakan hukum serta instansi-instansi lainnya baik negeri maupun swasta, Lembaga -lembaga gerejawi dalam pengembangan dan implementasi ilmu hukum dan bidang ilmu pengetahuan lainnya.



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
NIM : 2340058040
Program Studi : Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tulis tugas akhir yang berjudul “Analisis Pelaksanaan dan Pengawasan Hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Indonesia” adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan sendiri dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dalam bentuk hasil putusan, buku-buku jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada karya Tugas Akhir saya.
2. Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah di publikasikan atau yang pernah di pakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian-bagian sumber informasi yang di cantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
3. Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera di dalam referensi pada tugas.

Kalau Terbukti saya tidak memenuhi apa yang dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini di anggap batal.

Jakarta, 1 Juli 2026
Yang Membuat Pernyataan



Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
2340058040



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

**“Pelaksanaan Dan Pengawasan Hukum Dalam Pengelenggaraan Jasa
Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Indonesia”**

Oleh:

Nama : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
NIM : 2340058040
Program Studi : Hukum
Peminatan : Hukum Ekonomi

Telah di periksa dan di setujui untuk di ajukan dan di pertahankan dalam Sidang Tugas Akhir guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu pada Program Studi Hukum Program sarjana Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia

Jakarta, 1 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing I

(Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.)
NUPTK: 5434757658137093

Pembimbing II

(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NUPTK: 0557759660138022

Ketua Program Studi Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum.)
NUPTK: 5759741642230062

Pjs. Dekan Fakultas Hukum

(Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.)
NUPTK: 0557759660138022



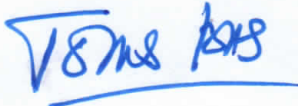
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Pada Tanggal 1 Juli 2026 telah diselenggarakan Sidang Skripsi untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Indonesia, atas nama:

Nama : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
NIM : 2340058040
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

Termasuk Ujian Tugas Akhir yang berjudul **“Pelaksanaan Dan Pengawasan Hukum Dalam Pengelenggaraan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Indonesia”** oleh tim Penguji yang terdiri dari:

Nama Penguji	Jabatan dalam Tim Penguji	Tanda Tangan
1 Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.	Ketua	
2 Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.	Anggota	
3 Francois Geny Ritonga, S.H., M.H.	Anggota	



UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
NIM : 2340058040
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Jenis Tugas Akhir : Skripsi
Judul : Analisis Pelaksanaan dan Pengawasan Hukum
dalam Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan
Penundaan Kapal di Perairan Indonesia.

Menyatakan bahwa:

1. Tugas akhir tersebut adalah benar karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar akademik di perguruan tinggi manapun;
2. Tugas akhir tersebut bukan merupakan plagiat dari hasil karya pihak lain, dan apabila saya/kami mengutip dari karya orang lain maka akan dicantumkan sebagai referensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Saya memberikan Hak Noneksklusif Tanpa Royalti kepada Universitas Kristen Indonesia yang berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilih hak cipta.

Apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual atau Peraturan Perundangan-undangan Republik Indonesia lainnya dan integritas akademik dalam karya saya tersebut, maka saya bersedia menanggung secara pribadi segala bentuk tuntutan hukum dan sanksi akademis yang timbul serta membebaskan Universitas Kristen Indonesia dari segala tuntutan hukum yang berlaku.

Jakarta, 1 Juli 2026



Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
2340058040

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Pelaksanaan dan Pengawasan Hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Indonesia”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Ketertarikan penulis terhadap topik ini juga didorong oleh pengalaman Penulis dalam lingkungan kerja yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal, sehingga menumbuhkan ketertarikan untuk mengkaji aspek pengawasan hukum dan sanksi administratif dalam penyelenggaraannya.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, bimbingan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Angel Damayanti, S.IP., M.Si., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia;
2. Dr. dr. Forman Erwin Siagian, M.Biomed. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Pendidikan Universitas Kristen Indonesia;
3. Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H. selaku Pjs. Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia sekaligus Dosen Pembimbing Kedua, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Assoc. Prof. Dr. Rr. Ani Wijayati, S.H., M.Hum. selaku Kepala Program Studi Sarjana Hukum Universitas Kristen Indonesia;
5. Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Pertama, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, masukan, motivasi, serta bimbingan kepada Penulis selama proses penyusunan skripsi ini;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman selama masa perkuliahan;
7. Kedua anak tercinta Penulis, yang senantiasa memberikan doa, dukungan moral, dan kasih sayang, serta menjadi penyemangat dan inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan setiap tahapan pendidikan hingga penyusunan skripsi ini;
8. Keluarga Penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan doa;
9. Rekan-rekan sekaligus sahabat Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, utamanya pada Program Kelas Karyawan, yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama penyusunan skripsi ini; serta
10. Seluruh pihak yang telah membantu Penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis juga mempersembahkan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Almarhum ayah dan Almarhumah ibu tercinta. Meskipun tidak dapat mendampingi secara langsung hingga tahap ini, doa, kasih sayang, pengorbanan, dan nilai-nilai kehidupan yang telah diberikan menjadi sumber kekuatan dan motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan pendidikan ini.

Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum Administrasi Negara, Hukum Pelayaran, dan Hukum Kepelabuhanan, serta dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal di Indonesia.

Jakarta, 1 Juli 2026

Penulis,



Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti

NIM: 2340058040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
VISI DAN MISI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. Teori Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty Theory</i>).....	23
B. Teori Pengawasan Administratif	25
C. Tinjauan Umum Hukum Administrasi Negara.....	28
D. Kerangka Hukum Nasional dan Kebijakan Terkait.....	31
E. Konsep dan Pengertian Umum Pelayaran.....	35
F. Konsep dan Pengertian Umum Pemanduan dan Penundaan Kapal.....	36
F. Kelembagaan dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Jasa Pemanduan .. dan Penundaan Kapal.....	37

**BAB III PENGATURAN DAN PELAKSANAAN HUKUM DALAM
PENYELENGGARAAN JASA PEMANDUAN DAN PENUNDAAN KAPAL
DI PERAIRAN INDONESIA..... 49**

- A. Pengaturan Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal..... 49
- B. Pelaksanaan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal..... 53
- C. Kedudukan dan Peran Penerima Pelimpahan Pemanduan dan
Penundaan Kapal dalam Penyelenggara Jasa..... 60
- C. Kedudukan, Peran, dan Komunikasi Pemerintah Pusat dan KSOP/KUPP
dalam Penyelenggara Jasa..... 65

**BAB IV PENGAWASAN HUKUM DAN PENERAPAN SANKSI
ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN JASA PEMANDUAN
DAN PENUNDAAN KAPAL DI PERAIRAN INDONESIA.....70**

- A. Pengawasan Hukum terhadap Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan
Penundaan Kapal..... 70
- B. Bentuk dan Instrumen Pengawasan Administratif terhadap Penyelenggara
an Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal..... 74
- C. Penerapan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan
Jasa..... 80
- D. Hambatan dalam Pengawasan dan Penegakan Sanksi Administratif 90
- E. Peran Sistem Sipandu dalam Mendukung Pengawasan dan Penegakan
Sanksi Administratif..... 103
- F. Analisis Kesesuaian Pengawasan dan Sanksi dengan Prinsip Hukum Admi
nistrasi Negara..... 109

BAB V PENUTUP 120

- A. Kesimpulan 120
- B. Saran..... 121

DAFTAR PUSTAKA..... 122

ABSTRAK

- A Nama : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
B NIM : 2340058040
C Fakultas / Program Studi : Fakultas Hukum / Program Studi Hukum
D Judul : Analisis Pelaksanaan dan Pengawasan Hukum dalam Penyelenggaraan Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal di Perairan Indonesia
E Halaman : i-xii + 127 Halaman + Daftar Pustaka
F Kata Kunci : Pemanduan kapal, penundaan kapal, pengawasan hukum, sanksi administratif, Hukum Administrasi Negara

G Ringkasan Isi :
Jasa pemanduan dan penundaan kapal penting dalam menjaga keselamatan pelayaran, kelancaran arus kapal, serta keteraturan penyelenggaraan pelabuhan di perairan Indonesia. Dalam praktiknya, pelayanan ini melibatkan Pemerintah, Pengawas Pemanduan, dan Badan Usaha Pelabuhan atau Pengelola Terminal penerima pelimpahan kewenangan, sehingga diperlukan pengaturan dan pengawasan hukum agar pelayanan berjalan tertib dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum jasa pemanduan dan penundaan kapal telah memberikan dasar kewenangan yang cukup jelas, namun pelaksanaannya masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, permasalahan koordinasi antarotoritas, kesenjangan pembuktian administratif, risiko penyalahgunaan kewenangan, serta belum optimalnya digitalisasi pengawasan. Dalam hal ini, instrumen digital seperti Sipandu berperan sebagai instrumen pendukung pengawasan dan pencatatan administratif yang dapat memperkuat transparansi dan evaluasi pelayanan.

Disimpulkan bahwa mekanisme pengawasan dan sanksi administratif dalam penyelenggaraan jasa pemanduan dan penundaan kapal pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip Hukum Administrasi Negara. Namun, penguatan kapasitas kelembagaan, tertib administrasi, dan optimalisasi sistem informasi masih diperlukan agar keselamatan pelayaran, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum dapat terwujud lebih efektif. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara, Hukum Pelayaran, dan Hukum Kepelabuhanan serta menjadi masukan bagi pemerintah dan penyelenggara jasa agar pengawasan, kepatuhan administratif, dan keselamatan pelayaran dapat berjalan lebih efektif.

- H Daftar Acuan : 26 Buku + 23 Jurnal + 13 Perundang-undangan
I Dosen Pembimbing I : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Dosen Pembimbing II : Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.

ABSTRACT

- A *Name* : Dwi Dyah Mumpuni Ririh Murti
B *Student ID* : 2340058040
C *Faculty / Department* : Faculty of Law / Department of Law
D *Title* : *An analysis of the Implementation and Legal Supervision of Pilotage and Towage Services in Inodonesian Waters*
E *Pages* : i-xii + 127 Pages + Bibliography
F *Keywords* : Pilotage services, towage services, legal supervision, administrative sanctions, Administrative Law
G *Summary of Content* :

Pilotage-towage services play an important role in ensuring maritime safety, efficient vessel traffic, and the orderly operation of ports in Indonesian waters. These services involve the Government, Pilotage Supervisors, and Port Business Entities (Badan Usaha Pelabuhan) or Terminal Operators that have received delegated authority. Therefore, legal regulation and supervision are required to ensure orderly and accountable service delivery.

The findings indicate that the legal framework governing pilotage and towage services provides a clear basis of authority. However, its implementation still faces several challenges: limited human resources, inter-agency coordination issues, gaps in administrative evidence, risks of abuse of authority, and the suboptimal digitalization of supervision. Digital instruments such as Sipandu support supervision and administrative record-keeping, thereby enhancing transparency and service evaluation.

This study concludes that the mechanisms of supervision and administrative sanctions in the provision of pilotage and towage services are generally consistent with the principles of Administrative Law. Nevertheless, strengthening institutional capacity, improving administrative order, and optimizing information systems remain necessary to enhance maritime safety, legal certainty, and the protection of public interests. The study is expected to contribute to the development of Administrative Law, Maritime Law, and Port Law, while providing recommendations for improving supervision and administrative compliance.

H *References* : 26 Books + 23 Journal + 13 Statues
I *Supervisor I* : Assoc. Prof. Dr. Hendri Jayadi, S.H., M.H.
Supervisor II : Assoc. Prof. Dr. Tomson Situmeang, S.H., M.H.